

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN LANSIA DI DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

Anita Kusuma Wardani¹, Hikmah Muhaimin², Santosa³

Universitas Islam Majapahit

Abstraks : Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang sudah disusun secara berurutan. Biasanya dilakukan setelah perencanaan kebijakan yang sudah dianggap sempurna. Sesuai kebijakan yang mencakup aturan-aturan dengan berisi unsur keputusan dalam upaya pemilihan alternatif guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Dalam kaitannya Undang-undang yang mengatur tentang Lansia, seperti sandang, papan dan pangan. di Kabupaten Mojokerto adanya suatu Lembaga yang menaungi seluruh Lansia Kabupaten yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu Lansia yang tidak mempunyai keluarga ataupun terlantar akan di masukkan ke Panti Jompo dalam naungan Dinas sosial yang akan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah. Adanya anggaran dana dari APBD untuk setiap lansia yang ada di Panti Jompo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kesejahteraan lansia menurut Undang-undang Lansia Nomor 13 tahun 1998. Hasil penelitian terhadap kesejahteraan Lansia yang ada di Panti Jompo diukur dengan menggunakan 6 aspek yaitu kepentingan yang mempengaruhi, Tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumberdaya yang digunakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan Lansia

1 PENDAHULUAN

Menurut Walter A. Friedlander Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan sosial dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan sepanjang masa. Hal ini menunjukkan bahwasannya dibutuhkan adanya campur tangan Pemerintah dan masyarakat dalam menunjang kegiatan dengan Implementasi Kesejahteraan Lanjut Usia sehingga bantuan yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan para lanjut usia khususnya yang tidak potensial.

Menurut pasal 1 ayat Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang berisi kondisi seseorang yang terpenuhi berupa kebutuhan material, spiritual dan menjadi warga Negara dengan hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri sendiri sesuai dengan kemampuan, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi sosialnya bagi setiap masyarakat. Terdapat beberapa upaya yang dimiliki pemerintah untuk menanggulangi masalah

kesejahteraan sosial, diantaranya meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan bahwa yang bertugas dalam mengarahkan masyarakat, membimbing dan menciptakan suasana yang dapat mendukung suatu proses tercapainya tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi setiap lanjut usia adalah pemerintah. Dalam mewujudkan tugas dan tujuan pemerintah yang baik dan terpercaya sangat diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni dilihat dari kemampuan dapat memahami situasi bagaimana cara menciptakan metode pelayanan yang maksimal dan memuaskan bagi lanjut usia.

Proses penuaan (aging process) dalam perjalanan hidup manusia merupakan suatu hal yang wajar, dan akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai umur panjang. Menurut teori perkembangan manusia dimulai dari masa bayi, anak, remaja, dewasa, tua dan akhirnya masuk pada fase usia lanjut dengan umur 60 tahun dan di atas 60 tahun. Seiring berjalannya waktu, proses penuaan tersebut terjadi secara natural. Masa penuaan inilah yang kemudian banyak terjadi penurunan-penurunan dilihat dari aspek fisik dan psikologis.

• Anita Kusuma Wardani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: anita.kusuma10@gmail.com

• Hikmah Muhaimin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: hikmahmuhaimin@gmail.com

• Santosa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: santosaip@unim.ac.id

Pertumbuhan usia harapan hidup yang semakin meningkat berdampak pada jumlah lanjut usia (lansia) tiap tahunnya. Pembangunan bisa berdampak negatif pada peningkatan perpindahan dari desa ke kota karena setiap lahan di desa sudah banyak pabrik yang dibangun, meningkatnya aktivitas ekonomi wanita dan perubahan sistem perekonomian tradisional ke perekonomian modern yang mengurangi partisipasi kerja lansia. Dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena peningkatan jumlah penduduk lanjut usia ini menimbulkan permasalahan global.

Permasalahan lansia menjadi suatu permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dengan baik, sehingga setiap lansia bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah seperti kebutuhan fisik yang meliputi rumah/tempat tinggal/asrama, kesehatan, pakaian dan makanan. Selain itu, kebutuhan psikis/kejiwaan juga sangat penting seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesama lanjut usia maupun anak muda untuk mendapatkan rasa nyaman, aman dan damai. Dalam permasalahan lanjut usia juga membutuhkan kemampuan spiritual yang tinggi yang berhubungan dengan setiap aspek keagamaan dan kepercayaan bagi setiap pribadi masing-masing. Serta kebutuhan ekonomi yang melekat bagi setiap lanjut usia yang sudah tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri dan juga yang ditelantarkan oleh anak kandungnya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki suatu kendala, hambatan atau gangguan untuk melakukan fungsi sosial bagi setiap individu mengakibatkan kurang terpenuhinya bahkan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani dan sosial) sesuai yang dibutuhkan setiap individu. Hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kecacatan, kemiskinan, keterlantaran, tuna sosial, keterbelakangan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Kehadiran lembaga pemerintah kesejahteraan sosial lanjut usia diakui memberikan nilai positif bagi penyediaan akses pelayanan lanjut usia, dengan memberikan kontribusi penjangkauan berkisar antara 5-10 % dari lanjut usia yang membutuhkan pelayanan.

Adanya lembaga kesejahteraan sosial dalam naungan Dinas Sosial yang berperan penting bagi masyarakat karena bisa menempatan dan melindungi lansia yang terlantar di

Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan dan lanjut usia terlantar di Kabupaten Mojokerto. Dengan penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi dengan menggunakan judul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 dalam meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ”.

2. KERANGKA TEORI

Menurut Grindle, implementasi adalah suatu proses tidak secara umum berupa administratif yang diteliti melalui tingkat program tertentu. Sedangkan menurut Van Meter dan Horn bahwasannya implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan variable tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Pada penelitian ini lebih berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Meriee S. Grindle dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan mencakup 6 aspek yang harus diperhatikan sebagai berikut:

Interest Affected (Kepentingan yang Mempengaruhi) : berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Type of Benefits (Tipe Manfaat) : Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Misalnya, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor

Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai): Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan

daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan) : Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Program Implementer (Pelaksana Program) : Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

Resources Committed (Sumber Daya yang Digunakan) : Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Keenam faktor tersebut dinilai sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan Lansia dalam hal ini ialah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, jika keenam aspek tersebut dilakukan dalam setiap implementasi maka akan menghasilkan kepuasan (output) bagi Lansia yang ada di Panti Jompo, khususnya Panti Werdha Mojopahit.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian Deskriptif, yaitu penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Pada umumnya penelitian deskriptif hanya menyajikan. Peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu hendaknya dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan senantiasa di. manfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang dimiliki keadaannya. Penelitian ini dilakukan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang di selidiki mengenai masalah yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto khususnya dalam Ruang Lingkup Lansia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan

suatu gejala sosial. Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya.

Dalam penelitian yang menggunakan menggunakan deskriptif, prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Ciri lain metode deskriptif ialah titik berat pada observasi dan suasana alamiah (naturalistis setting). Peneliti bertindak sebagai pengamat. Ia hanya membuat kategori perilaku, mengamati segala, dan mencatatnya dalam buku observasinya. Dengan suasana alamiah dimaksudkan bahwa peneliti terjun ke lapangan. Ia tidak berusaha untuk memanipulasi variabel. Karena kehadirannya mungkin mempengaruhi perilaku gejala (reactive measures), peneliti berusaha memperkecil masalah ini. Lokasi dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah staff Dinas Sosial, pengurus Panti Werdha dan Pasien yang ada di Panti.

Wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam. Wawancara yang akan dituju peneliti adalah informan yang mempunyai peranan besar dalam melaksanakan Implementasi sesuai Undang-undang. Dimana setiap struktur birokrasi mempunyai TUPOKSI masing-masing sesuai keahlian. Sehingga dengan wawancara kepada informan tersebut akan mendapatkan data yang valid.

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Selain dibuktikan dengan wawancara dengan informan, peneliti juga melakukan observasi secara langsung ke Dinas Sosial dan ke Panti Jompo untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti. Dengan adanya observasi peneliti bisa lebih mendapatkan data riil sesuai bukti yang terlihat seperti Gedung , Kondisi Fisik, Mimik wajah Informan. Dan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Informan dapat disinkronkan dengan wawancara dari Informan.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara, pengaruh sistem penyimpanan arsip suara terhadap kemudahan proses temu kembali informasinya. Dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian. Informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama di peroleh dari wawanca kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Sekretaris , Kepala Bidang Jaminan Sosial, Lansia dan para Staf yang ada di Panti dan para Lansia yang menjadi sumber

data yang akurat. Data yang diperoleh melalui observasi langsung Panti. Kepala UPT PMKS “MOJOPAHIT” yang memahami tentang masalah yang diteliti.

Data yang didapat secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang diperoleh dari pihak lain dan dari buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, internet dan catatan resmi yang berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Menurut Merilee S.Grindle ada 6 aspek utama dari implementasi yaitu kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumberdaya yang digunakan. Aspek-aspek tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan sesuai dengan alur berfikir peneliti yang digunakan untuk melihat seberapa jauh implementasi yang dilakukan struktur birokrasi terhadap kelompok sasaran sesuai kebijakan yang dibuat.

Kepentingan Yang Mempengaruhi

Menurut merilee S. Grindle, yang dimaksud kepentingan yang mempengaruhi yaitu dimana suatu kebijakan tersebut mempunyai kepentingan yang dapat mempengaruhi suatu pengimplementasian kebijakan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 pasal 7 yang berisi tentang perlindungan sosial adalah tujuan pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia yang tidak potensial agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Diantaranya bantuan sosial, Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial, kesehatan, pemberdayaan dalam lingkup meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan atau kerajinan. Instansi pemerintah yang di maksud untuk melaksanakan mandat dari pemerintah pusat yaitu Dinas Sosial berupa peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Yaitu Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial. Maka indikator tersebut akan melibatkan banyak kepentingan pribadi maupun kelompok. Dimana Dinas Sosial Kabupaten bisa melaksanakan kebijakan dengan baik terhadap kelompok sasaran. Pemerintah berharap dapat berlaku adil untuk memperbaiki kehidupan lansia yang terlantar maupun tidak mempunyai keluarga dan murni tugas negara bukan kepentingan pribadi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Sosial menyerahkan sepenuhnya kepada Panti Werdha untuk melaksana tugas yang ditujukan untuk Lansia. Karena pada dasarnya Dinas sosial Kabupaten Mojokerto tidak hanya menangani Lansia saja melainkan masalah sosial lainnya seperti gepeng dan gelandangan. Sehingga Dinas Sosial menyerahkan tugas kepada Panti werdha untuk Lansia berupa bantuan sosial berupa fasilitas kamar yang nyaman, konsumsi yang sesuai kebutuhan Lansia (lauk pauk yang dilarang), Pakain yang layak untuk di pakai sehari-hari, pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial, dengan menciptakan perlindungan dan pelayanan yang baik untuk Lansia ketika sakit.

Dalam hal kepentingan yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat dan disahkan oleh Bupati berisi TUPOKSI untuk menjalankan tugas sosial. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak wan pranoto setiap pegawai di Dinas Sosial mempunyai TUPOKSI sendiri setiap bidangnya. Yang menangani tentang Lansia yaitu bidang Pemberdayaan Sosial pada seksi Penyuluhan sosial dimana Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat melalui Dinas Sosial terlebih dahulu.

Seperti yang sudah dicantumkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto nomor 62 tahun 2016 yang berisi pada pasal 11 yaitu bidang pemberdayaan sosial membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya penyuluhan untuk Lansia setiap bulannya, seperti kesehatan adanya perawat sesuai bidangnya untuk mengontrol kesehatan Lansia setiap hari dengan memeriksa tekanan darah dan suhu badan

Tipe Manfaat

Tipe manfaat adalah suatu kebijakan yang berupaya untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus mempunyai dampak positif dan negatif. Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1998 Pasal 4 Upaya peningkatan kesejahteraan Lansia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, dengan terwujudnya kemandirian dari Lansia yang masih potensial dan terpeliharanya sistem nilai budaya serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adanya Program yang dibuat oleh Instansi Dinas Sosial untuk Lansia yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Lansia. Hal ini penting mengingat para Lansia yang ada di panti jompo membutuhkan bantuan yang tidak hanya berupa sandang,papan dan pangan tetapi juga kasih sayang.

Berdasarkan ulasan teori yang dikemukakan oleh Merilee S.Grindle adalah suatu kebijakan akan memberikan dampak

negatif maupun positif bagi pelaku dan kelompok sasaran. Adanya program peningkatan kesejahteraan Lansia sudah terpenuhinya pangan yang terjadwal 3x sehari, papan yang nyaman dan bersih, sandang yang bersih, biaya operasional : listrik, air dan sebagainya Adanya dampak positif yang ada akan menjadi tolak ukur kebijakan yang akan dibuat dimasa mendatang. Lansia yang ada dipanti Jompo dalam naungan Dinas sosial merasa aman karena pada dasarnya masa tua seharusnya seorang anak harus merawat orangtuanya dengan baik, tetapi berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Mereka dilantarkan karena masalah ekonomi dan masa tua mempunyai sifat kekanak-kanakan. Sehingga yang menjadi perawat dalam Panti Jompo memiliki kesabaran yang lebih. Fasilitas lain berupa sandang, pangan dan papan yang layak bagi setiap Lansia. Karena tidak setiap Lansia di Panti Jompo mempunyai keluarga.

Adapun dampak negatif yang muncul adalah keluarga yang tersisa tidak mau menjenguk. Beliau menikmati masa tua dengan sebatang kara, tidak jarang mereka merasa kesepian dan sedih ketika anak yang dulu dibesarkan tidak bisa merawat mereka dengan baik. Bahwasannya Lansia memiliki sifat yang kekanak-kanakan, sehingga akan menimbulkan emosi. Tetapi tidak semua Lansia mempunyai badan yang sehat dan bisa melakukan kegiatan secara mandiri. Sehingga ada beberapa perawat yang harus memandikan dan mencuci baju Lansia setiap hari, selain memberi makan dan ditaruh dikamarnya langsung. Sedangkan Lansia yang masih dikatakan sehat bisa mengurus dirinya secara mandiri. Tidak jarang Lansia juga mendapatkan bantuan dari para donatur dengan memberikan makanan, baju dan uang.

Derajat perubahan yang ingin dicapai

Menurut teori Merille S. Grindle adalah setiap kebijakan memiliki target/tujuan yang hendak dicapai. Sebagai mana yang ingin dijelaskan bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Seperti suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan program bantuan kredit dan beras kepada kelompok sasaran.

Berdasarkan penjabaran dari teori merille S. Grindle suatu kebijakan haruslah mempunyai derajat perubahan yang ingin dicapai atau tolak ukur suatu kebijakan. Sehingga dimasa mendatang kebijakan akan berhasil dengan sesuai tujuan. Dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa Undang-Undang untuk Lansia sudah dapat dikatakan bertujuan untuk menyejahterahkan Lansia yang ada di Panti. Dengan adanya wawancara bersama bapak

Budi selaku UPT PMKS Mojopahit, dari Kebijakan tersebut sudah ada derajat perubahan. Setiap pegawai sudah melaksanakan sesuai tugas masing-masing.

Seperti, halnya yang dikatakan Ibu maya selaku perawat medis yang secara langsung menagangani kesehatan lansia yang ada di Panti. Lansia Mendapatkan perawatan yang layak, ketika Lansia sudah mengalami sakit yang agak parah, akan dirujuk ke puskesmas terdekat, dengan puskesmas rujukan yaitu puskesmas Sooko. Salah satu bentuk kasih sayang meskipun bukan keluarga kandung. Letak Pengambilan Keputusan

Menurut merille S.Grindle Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan adalah suatu peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Sehingga pelaku pengambilan keputusan tepat sasaran.

Berdasarkan penjabaran Teori merille S.Grindle ,keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan merupakan hal yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab suatu pertanyaan sesuai dengan keputusan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang menyimpang dari rencana semula. Dengan begitu pengambilan keputusan adalah pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Letak pengambilan keputusan dilaksanakan oleh Kepala UPT, Dinas sosial yang menerima mandat dari pemerintah dan yang memutuskan kelayakan pasien adalah pihak Panti sebagai pemegang peranan penting.

Dilihat dari struktur birokrasi kabupaten yang mengatur Lansia adalah Dinas Sosial Kabupaten. Kesesuaian program yang sudah tepat sasaran. Instansi Dinas Sosial hanya mengurus sistem Administrasi, saat ada pengajuan Lansia. Dileksi terlebih dahulu oleh pihak panti, kelayakan sesuai kriteria Panti. Setelah adanya kegiatan survey. Dan dinyatakan layak, akan dilaporkan kepada dinas sosial. dan UPT PMKS Panti Werdha yang menjalankan program pemerintah yang diterapkan kepada lansia.

Adapun Standart Operasional Prosedur masuk ke UPT PMKS Panti Werdha adalah :

- Mengajukan usulan calon klien kepada sekretaris (usia minimal 60 tahun, membawa berkas surat pernyataan dari kepala dusun).
- Sekretaris mengajukan usulan calon klien kepada kepala UPT

- c. Menugaskan Staff/ Perawat medis untuk Mensurvey kelayakan calon klien (status terlantar atau tidak memiliki keluarga, kondisi fisiknya harus mandiri).
- d. Identifikasi dan pemeriksaan calon klien (memiliki riwayat penyakit atau cacat sejak lahir)
- e. Memutuskan kelayakan klien.
- f. Memutuskan kelayakan klien (berdasarkan survey dari staff)
- g. Mempersiapkan dan melengkapi administrasi penyerahan klien
- h. Menerima klien
- i. Mempersiapkan asrama
- j. Melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial.

Pelaksana Program

Menurut Merille S.Grindle dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Sudah harus terpapar atau terdata dengan baik. Dimana pelaksana kebijakan sesuai bidang sosial. Berdasarkan Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 Pasal 7 pemerintah bertugas dan mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, yang bertanggung jawab atas terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial adalah pemerintah. Yang dimaksud pemerintah adalah Dinas sosial dengan dibantu oleh Kepala UPT Panti Werdha dan jajarannya. Seperti yang sudah dicantumkan dalam peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2018 UPTD Pesanggrahan PMKS merupakan unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang tertentu di bidang sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan bidang yang terkait.

Berdasarkan penjabaran dari Teori Merille S. Grindle pelakasa program dalam mngimplementasikan suatu kebijakan yang dinamakan Undang-undang berisi tentang Lansia yaitu UPT PMKS Panti Werdha yang sudah kompeten dibidangnya. Pendidikan yang mumpuni akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang ditujukan kepada Lansia. Adanya perawat juga berpengaruh dengan baik, karena seorang perawat sejatinya diperuntuhkan untuk merawat orang sakit.

Adanya program yang dilaksanakan seperti senam dan keterampilan yang dibuat oleh lansia. Bagaimana dalam mengajari lansia harus dengan kesabaran yang lebih. Meskipun para Lansia semua dengan sakit. Tetapi perawat disana tidak membedakan cara merawat Lansia sakit dan

Tidak. Semua merata dan adil. Adanya kekeluargaan yang kuat antara pegawai dan Lansia disana.

Dari penjabaran diatas melalui wawancara dengan narasumber dapat menyimpulkan bahwasannya suatu kebijakan jika tidak dilaksakan seseorang yang kompeten tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan. Adanya pegawai yang berpendidikan akan bisa diandalkan sesuai keahliannya. Sehingga kedepannya bisa menjadikan program akan mendapatkan progres yang tinggi.

Sumber daya Yang Digunakan

Menurut Merille S.Grindle suatu kebijakan jika sumber daya yang digunakan sesuai dengan kriteria dan memadai akan berjalan dengan baik. Sumberdaya Biaya yaitu Adanya Anggaran dari APBD, menurut data yang diperoleh peneliti dari responden, anggaran selama 2 tahun ini sama, tetapi responden tidak menyebutkan berapa nominalnya hanya menjelaskan rincian biaya sedikit untuk makan sehari-hari, biaya operasional seperti listrik dan air. dan kebutuhan kesehatan seperti obat-obatan.

Berdasarkan penjabaran teori menurut Merille S.Grindle suatu kebijakan akan berjalan dengan baik sesuai tujuan ialah sumberdaya berupa anggaran harus jelas perincihannya, dalam pandemi ini anggaran makin berkurang karena kegiatan yang dilakukan hanya sedikit dan dalam lingkup panti Jompo. Implementasi Undang- undang tentang Lansia yaitu Lansia Panti Jompo, dibidang sumberdaya manusia dengan membutuhkan jiwa sosial yang tinggi tanpa memilah dan memilih pekerja dengan tujuan mengabdikan kepada negara.

Sumberdaya yang digunakan sesuai dengan keahliannya. Tidak hanya satu bidang melainkan semua bidang seperti, perawat dalam bidang sosial mengurus Lansia yang sudah tidak bisa berjalan dan makan membutuhkan bantuan perawat. Dalam bidang kesehatan, selagi Lansia yang sakit tidak terlalu parah akan ditangani langsung oleh perawat. Sehingga sumberdaya yang ada di Panti Jompo bisa melaksanakan kebijakan dengan mudah tanpa halangan, karena kelembutan hati dan tidak ada kesenjangan diantara mereka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di Dinas sosial Kabupaten Mojokerto dan di Panti Jompo di simpulkan bahwa implementasi Undang-undang tentang Lansia dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat di lihat dari : Kepentingan yang mempengaruhi (Interst Affected) berada pada kategori persentase murni sehingga kesejahteraan yang didapatkan oleh lansia dari kepentingan yang mempengaruhi dinilai

tidak ada maksud dan tujuan tertentu. Kepentingan yang dimiliki oleh struktur birokrasi hanya ingin menjalankan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Tipe manfaat (type of benefits) berada pada kategori persentase sangat bermanfaat sehingga setiap kebijakan yang ditujukan kepada lansia akan membawa manfaat baik dan buruk. Lansia bisa mendapatkan rasa aman, kebutuhan spiritual dengan adanya masjid sebelah asrama, sandang yang terpenuhi dengan baik.

Derajat Perubahan yang ingin dicapai (Extent Of Change Envision) berada pada kategori persentase baik dimana kebijakan yang dibuat pemerintah untuk Lansia harus memiliki derajat perubahan yang lebih baik. Lansia diberi suatu keterampilan sesuai kemampuan untuk mengisi waktu luang sehingga tidak gampang bosan, adanya kerjasama dengan puskesmas sooko sehingga ketika sakit akan dirujuk kesana dan mendapatkan perawatan yang baik.

Letak Pengambilan Keputusan (State of Decision Making) berada pada kategori persentase tepat sasaran dalam kaitannya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk Undang-undang tentang lansia. Dalam menyeleksi Lansia yang akan masuk ke Panti Jompo Kabupaten adanya kriteria yang diinginkan oleh Kepala UPT PMKS Mojopahit yaitu usia 60 tahun, dalam keadaan terlantar, kondisi fisiknya yang mandiri.

Pelaksana Program (Program Implementer) berada pada fase pada kategori persentase sesuai bidang dalam melaksanakan program kebijakan untuk Lansia adalah pegawai Panti Jompo. Panti Jompo yang akan mengatur segala kebutuhan lansia yang ada dipanti. Sedangkan Dinas Sosial hanya mengatur sistem administrasi saja. Ketika bantuan yang turun dari pemerintah yang dianggarkan Melalui APBD akan turun ke Dinas Sosial, setelahnya akan di berikan kepada Panti Jompo.

Sumberdaya yang digunakan (Resources Committed) berada pada fase pada kategori persentase sangat baik dalam melaksanakan dan mengurus Lansia sangat baik dan setiap pegawai di Panti Jompo sangat ramah, sopan santun dan berwibawa, Adanya kepedulian yang lebih terhadap Lansia. Profesi perawat yang banyak dibutuhkan oleh Panti Jompo karena Lansia di sana hanya ingin dirawat dan diberi kasih sayang selaknya anaknya sendiri.

DAFTAR PUSRTAKA

[1] Rangoly Ivo, Jurnal Administrasi Publik, Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut usia di kecamatan Tanimbar selatan kabupaten

Maluku tenggara barat.

- [2] Asyari M. Farid. Paradigm volume 04 nomor 03 tahun 2016
- [3] Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia
- [4] Kementerian Sosial RI, Panduan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2013.
- [5] Kementerian sosial RI, Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Direktorat Jendral
- [6] Rehabilitas Sosial, Standardisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Jakarta, 2009.
- [7] Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New Jersey: Princetown University Press.
- [8] eprints.umm.ac.id/35915/3/jiptummpp-gdl-haryati kam
- [9] M. Hariwijaya, 2017, Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Desertasi, (Yogyakarta:Parama Ilmu).
- [10] Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007)
- [11] Rachmat Kriyantono, S., Sos., M.Si, 2006, Teknik Riset (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)